



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PENINJAUAN KAWASAN
STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN)
DIENG DI KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL 14 - 16 SEPTEMBER 2023

KOMISI V DPR-RI
JAKARTA, 2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
I.1. Dasar Hukum.....	3
I.2. Maksud dan Tujuan	3
I.3. Lokasi dan Waktu	4
I.4. Agenda Kunjungan	4
II. GAMBARAN UMUM	4
III. HASIL KUNJUNGAN KERJA	5
II.1. Hasil Pertemuan	5
II.2. Pendalaman Komisi V DPR RI	8
IV. KESIMPULAN ATAU REKOMENDASI	9
V. PENUTUP	10
VI. LAMPIRAN	11
Foto Kegiatan	11



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PENINJAUAN KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA NASIONAL (KSPN) DIENG DI KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL 14 - 16 SEPTEMBER 2023

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

Dasar hukum dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dieng di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23.
2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Rapat Internal Komisi V DPR RI Tanggal 22 Agustus 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kunjungan Kerja Spesifik adalah untuk mengetahui secara langsung serta menggali informasi terkait Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dieng di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:

butir f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dilaksanakan pada Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 dalam rangka Meninjau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dieng di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 14-16 September 2023 yang dipimpin langsung oleh **H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si (A-130 / F-P GERINDRA / DAPIL SULSEL II)**.

I.4. Agenda Kunjungan

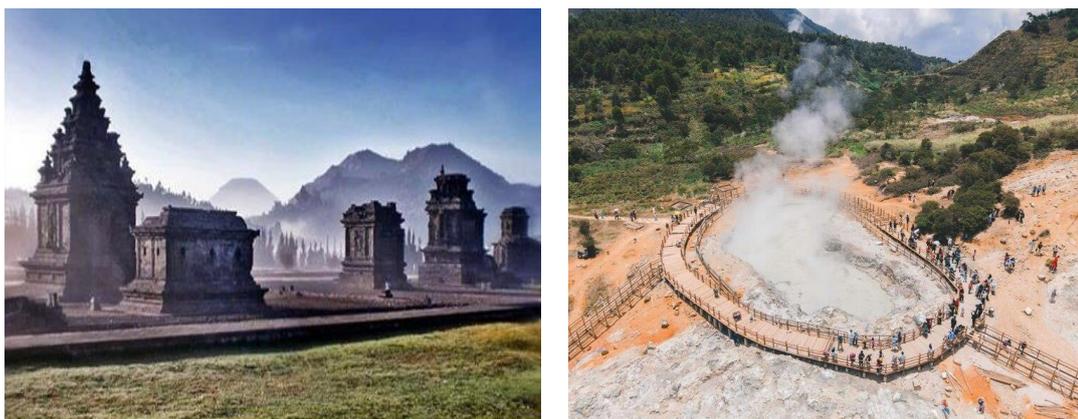
Agenda kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah yaitu dalam rangka Meninjau Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dieng, sekaligus melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR sebagai Mitra Kerja Komisi V DPR RI serta Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

II. GAMBARAN UMUM

Secara administrasi, Kawasan Wisata Dieng berada dalam tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Batang. Inti Kawasan Wisata berada pada wilayah Desa Dieng Kulon di Banjarnegara dan Desa Dieng (Dieng Wetan) di Wonosobo.

Kawasan Wisata Dieng memiliki potensi alam yang indah dengan udara yang masih alami dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Selain pemandangan alam yang indah, Dieng juga menyimpan banyak objek wisata geologi dan sejarah seperti Kawah Sikidang, Kawah Sileri, Telaga Warna, Gunung Prau, dan kawasan candi-candi.

Total luas kawasan wisata Dieng adalah 4.600 hektare, saat ini yang ditangani penataan oleh Kementerian PUPR yaitu 5,7 hektare. Adapun lokasi penanganan meliputi kompleks wisata Candi Arjuna dan kawasan Sikidang di Banjarnegara serta kawasan Telaga Warna, Bukit Sikunir, dan kawasan Sikidang di Wonosobo. Lingkup pekerjaan setiap kawasan wisata rata-rata meliputi renovasi bangunan utama, pembangunan kantor pengelola, pembangunan mushola, gudang, dan ruang tiket/informasi, penataan area amphiteater/camping ground, penataan kios pedagang, area parkir, dan lansekap.



Gambar: Candi Arjuna (kiri) dan Kawah Sikidang (kanan)

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

II.1. Hasil Pertemuan

1. Penjabat Bupati Banjarnegara

- a) Terkait pengembangan infrastruktur terutama akses ke tempat Wisata Dieng, sebab akses jalan menuju Dieng cukup sempit dan cukup jauh. Usulan kami agar akses melalui Kecamatan Pagentan.
- b) Selain itu kami ingin mengusulkan agar Pasar Purwareja Klampok dibangun kembali setelah mengalami kebakaran pada Juni 2023.
- c) Terkait Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, kami sudah mengusulkan tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. APBD Kabupaten Banjarnegara pada tahun ini difokuskan pada Pendidikan dan Kesehatan sehingga anggaran daerah untuk pembangunan jalan daerah sangat terbatas.
- d) Pada tahun 2022 kami sudah membuat DED untuk akses Jalan Plipiran, Kecamatan Pandanarum namun karena anggaran kami belum cukup sehingga tidak dapat mengerjakannya.

- e) Terkait dengan lahan yang diusulkan oleh Ditjen Cipta Karya untuk penambahan kios, lahannya akan kami siapkan sebagai bentuk dukungan kami.

2. Wakil Bupati Wonosobo

- a) Kami mengapresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah melakukan Penataan Kawasan Dieng dan sekitarnya.
- b) Kami berharap atas dukungan Komisi V DPR RI Penataan Kawasan Dieng berjalan dengan baik.
- c) Kami selaku Pemda Wonosobo akan terus mengawal program Penataan KSPN Dieng ini sebaik-baiknya dan akan terus bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk KSPN Dieng yang lebih baik kedepannya.

3. Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR

- a) Penataan Kawasan Dieng sudah tertera dalam PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas), yaitu Kawasan Dieng ini masuk dalam bagian yang terintegrasi dari pengembangan KSPN Borobudur dan sekitarnya untuk mendukung pengembangan kepariwisataan wilayah Jawa Tengah, DIY, dan Nasional.
- b) Penataan Kawasan Dieng berada di 2 (dua) kabupaten yaitu di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Jenis pekerjaan yang masuk pada Kabupaten Banjarnegara adalah Koridor dan Plaza Candi Arjuna, Parkir Aswatama, serta Kawasan Kawah Sikidang. Sedangkan pekerjaan yang masuk pada wilayah Kabupaten Wonosobo yaitu Kawasan Telaga Warna dan Kawasan Bukit Sikunir.
- c) Kementerian PUPR melalui Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) telah melakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan Bupati Wonosobo dan Bupati Banjarnegara, inti dari nota kesepakatan tersebut adalah Bupati Wonosobo dan Bupati Banjarnegara bersedia memenuhi *readiness criteria*. Sedangkan Kementerian PUPR bertugas melakukan pembangunan penataan kawasan sampai dengan acara serah terima.
- d) Timelinenya yaitu dimulai dari Tahap Perencanaan yang dilakukan tahun 2022, kemudian Tahap Pelaksanaan dimulai dari tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024, dan yang terakhir Tahap Pasca Pelaksanaan/Masa Pemeliharaan yaitu dari tanggal 19 Juli 2024 sampai tanggal 18 Juli 2025 (1 tahun).

- e) Nilai kontrak Penataan Kawasan Dieng yaitu pekerjaan fisiknya senilai Rp.80,7 Miliar dan supervisi senilai Rp.2 Miliar.
- f) Pada Koridor dan Plaza Candi Arjuna kita akan melakukan penataan kawasan dan penataan pedagang sekaligus penataan parkir. Pada Parkir Aswatama kita fokuskan untuk penataan parkir, sedangkan untuk Kawasan Sikidang kami melakukan penataan kawasan, penataan pedagang, penataan *amphitheater*.
- g) Untuk Kawasan Sikidang di Daerah Banjarnegara terdapat 277 kios, sedangkan perencanaan awal kami 170 kios, masih terdapat gap sekitar 107 kios yang belum terakomodir, kios sebelumnya berukuran 2x3 sekarang direncanakan ukuran kiosnya bertambah menjadi 3x3.
- h) Saat ini kami terus berkoordinasi dengan BPIW untuk merencanakan master plan yang besar, saat ini status Dieng masih KSN (Kawasan Strategis Nasional) belum KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), di Jawa Tengah yang berstatus KSPN baru Borobudur.

4. Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR

- a) Peran Ditjen Bina Marga tidak secara langsung mengerjakan infrastruktur jalan ke Kawasan Dieng, akan tetapi kami memfasilitasi ruas-ruas jalan nasional disekitar Kawasan Dieng, yaitu pemeliharaan preventif Jalan Kretek - Batas Kabupaten Temanggung, pemeliharaan berkala Jembatan Banjarnegara dan Wonosobo, penanganan longsor untuk wilayah Banjarnegara dan Wonosobo, rehabilitasi jalan dan pemeliharaan berkala Jembatan Wonosobo-Temanggung-Secang-Batas DIY, serta pembangunan Jembatan Gantung Batur - Giritirta.
- b) Khusus Inpres No.3 Tahun 2023 atau Inpres Jalan Daerah, yang masuk dalam daftar kami hanya satu yang menuju ke Kawasan Dieng yaitu Jalan Rake Watuhumalang di Wonosobo.
- c) Untuk tahun depan kami masih tetap melaksanakan kegiatan Inpres Jalan Daerah, kami berharap agar usulan-usulan dari Ibu Lasmi selaku yang punya dapa bisa terakomodir, yang penting *readiness criterianya* terpenuhi.
- d) Kita berencana membangun Jalan Lingkar Kretek Wonosobo, akan tetapi permasalahannya adalah lalu lintas yang terjadi di Jalan Kretek Wonosobo (Kretek – BTS. Kab. Temanggung) dan (BTS. Kota Wonosobo – Kretek) yaitu alinyemen vertikal lebih besar dari 8% dan di ujung turunan ada persimpangan yang berdekatan dengan pasar dan sering terjadi kecelakaan.

5. Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR

- a) Terdapat 2 (dua) kegiatan dari Ditjen SDA untuk Kawasan Dieng yaitu Embung dan Penyediaan Air Baku.
- b) Khusus untuk embung, terdapat 2 (dua) embung yang berpotensi mendukung kegiatan di Kawasan Dieng yaitu Embung Balekambang dan Embung Wurung, desainnya sudah siap dan mudah-mudahan tahun depan mendapat alokasi dana untuk pekerjaan fisiknya.
- c) Khusus untuk air baku, terdapat potensi air baku yang sudah kita siapkan perencanaannya yaitu Air Baku Kaliamis di Kabupaten Banjarnegara. Rencana panjang pipa transmisi yaitu 9,1 km, hal ini kami gunakan untuk mendapatkan kualitas air yang sangat bagus sehingga pengolahannya tidak terlalu mahal, debit potensi yang bisa diambil yaitu maksimum 300 liter/detik. Air Baku Kaliamis ini tahun depan sudah bisa dikerjakan fisiknya karena alokasi dananya sudah ada.
- d) Kawasan Wonosobo dan Banjarnegara terdapat isu utama yaitu masalah sedimentasi, sepanjang jalan di daerah Wonosobo dan Banjarnegara banyak terdapat tanaman semusim yang ketika saat musim hujan maka terjadi sedimentasi yang cukup banyak. Oleh sebab itu kami juga mengerjakan kegiatan yang sifatnya non struktural yaitu kami mencoba mengubah kebiasaan masyarakat tersebut dengan berternak kambing.
- e) Terkait sedimentasi yang terjadi akibat tanaman semusim tersebut berdampak pada DAS Serayu yang hulunya terdapat Waduk Mrica, kondisi saat ini sudah 90% dipenuhi sedimentasi. Untuk mengangkat sedimentasi pada waduk membutuhkan dana yang sangat besar bahkan lebih murah kita membangun waduk baru.

II.2. Pendalaman Komisi V DPR RI

- a) Masalah utama adalah masalah akses jalan menuju ke KSPN Dieng yang sangat jauh, Kementerian PUPR perlu memikirkan akses jalan tercepat agar bisa sampai ke KSPN Dieng karena potensi wisatanya besar sekali. Perlu sinergi bersama antara Pemkab Banjarnegara, Pemkab Wonosobo, Kementerian PUPR, dan Komisi V DPR RI untuk mencari solusi terkait akses tercepat menuju KSPN Dieng.
- b) Terkait masalah air baku, terima kasih untuk program air baku di Desa Kaliurip, Banjarnegara yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk Air Baku

Kaliamis sudah saya usulkan dan sangat diharapkan agar segera dikerjakan karena masyarakat sedang menghadapi musim kekeringan.

- c) Untuk Ditjen Cipta Karya agar peristiwa Borobudur jangan terulang, diharapkan saling koordinasi dengan *stakeholder* terkait karena Kawasan Dieng ini banyak melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kehutanan, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga perlu perencanaan master plan yang matang secara detail.
- d) Terkait Jalan Kretek di Wonosobo dan Jalan Kretek di Bumiayu, kedua jalan tersebut memang sangat rawan kecelakaan. Semoga ada solusi dari Ditjen Bina Marga terkait jalan Kretek di 2 (dua) wilayah tersebut agar bisa mengurangi tingkat kecelakaan.
- e) Harapannya adalah agar pengelolaan KSPN Dieng bisa dikelola dengan baik dan benar.
- f) Wisata Dieng sudah terkenal sampai tingkat nasional, hanya saja akses menuju ke tempat Wisata Dieng sangat jauh dan ini menjadi keluhan wisatawan. Oleh karena itu, akses alternatif yang cepat untuk menuju ke KSPN Dieng perlu dipikirkan bersama-sama bagi semua *stakeholder* terkait. Seperti misalnya melalui jalur Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ke Dieng hanya 30 menit dengan kondisi jalan yang ekstrim, kemudian dari Bawang ke jalan tol hanya 15 menit, jika akses tersebut direncanakan dengan lebih baik lagi maka perjalanan ke Dieng bisa maksimal hanya 1 jam.
- g) Perlu melibatkan para seniman maupun para arkeolog untuk merencanakan Kawasan Dieng ini menjadi kawasan yang unik dari segi candi peninggalan masa lalu.

IV. KESIMPULAN ATAU REKOMENDASI

Terdapat beberapa kesimpulan atau rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan KSPN Dieng di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah pada Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 tanggal 14-16 September 2023, diantaranya:

1. Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk melakukan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait, sehingga bisa merencanakan master plan KSPN Dieng yang lebih baik lagi.

2. Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk segera melakukan studi perencanaan terkait akses alternatif yang cepat menuju ke KSPN Dieng.
3. Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk segera menyelesaikan Program Air Baku Kaliamis di Kabupaten Banjarnegara.
4. Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Marga, dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk segera menindaklanjuti usulan-usulan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah pada Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 tanggal 14-16 September 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan akan disampaikan dalam Rapat Komisi bersama Kementerian PUPR untuk ditindaklanjuti.

KETUA TIM

ttd

H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si
A-130

VI. LAMPIRAN

Foto Kegiatan















